



Puslatan
Pusat Pelatihan Pertanian

BBPP
Binuang

BerAKHLAK #bangga
melayani bangsa

RENSTRA

Rencana Strategis

**BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN BINUANG**

2025-2029



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PENULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
2025**



Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 85,
Binuang, Kabupaten Tapin,
Kalimantan Selatan 71183



bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id/



bbpp.binuang@pertanian.go.id

IKUTI KAMI:



Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Periode 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, BBPP Binuang memegang peran krusial dalam mencetak SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Dokumen Renstra 2025–2029 ini disusun sebagai kompas dan landasan operasional lembaga dalam merespons dinamika pembangunan pertanian nasional, transformasi pertanian modern, peningkatan swasembada pangan, serta penguatan mitigasi dampak perubahan iklim global.

Kurun waktu lima tahun ke depan, strategi kedinasan akan kami fokuskan pada standarisasi dan optimalisasi mutu pelatihan fungsional maupun teknis bagi aparatur dan nonaparatur. Selain itu, pengembangan model percontohan agribisnis yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kerja kami di seluruh regional Kalimantan akan terus diperluas. Dokumen ini menjabarkan target kinerja, peta jalan taktis, dan alokasi sumber daya yang akuntabel untuk memastikan kontribusi nyata BBPP Binuang terhadap target besar Kementerian Pertanian.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tentu menuntut komitmen, dedikasi, serta sinergi yang solid dari seluruh widyaiswara, pengelola program, pengelola sarana, serta kemitraan strategis dengan dinas pertanian daerah dan pelaku usaha pertanian. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Semoga segala upaya kita dalam memajukan kualitas SDM pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan bangsa senantiasa mendapat ridha dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Binuang, 30 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Atekan, S.P., M.Si
NIP 197210061999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Evaluasi Kondisi Organisasi	3
1.3. Capaian Kinerja 2020 – 2024	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	11
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.....	11
2.2. Visi, Misi dan Tujuan BPPSDMP Tahun 2025-2029	13
2.3. Sasaran Program BPPSDMP	17
2.4. Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian	18
2.5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BBPP Binuang	18
2.6. Manajemen Risiko.....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	21
3.1. Arah dan Kebijakan Kementerian Pertanian	21
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP	24
3.3. Strategi Operasional BBPP Binuang	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
4.1. Target Kinerja	28
4.2. Kerangka Pendanaan.....	30
BAB V PENUTUP.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Sertifikasi 2020-2024	7
Tabel 2. Capaian Pembinaan P4S 2020-2024	8
Tabel 3. Capaian Realisasi Anggaran 2020-2024	9
Tabel 4. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan BBPP Binuang.....	19
Tabel 5. Target Kinerja 2025 - 2029	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Purnawidya Se-Kalimantan 2020 - 2024.....	6
Gambar 2. Capaian Kerjasama	8
Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi	22
Gambar 4. Rumah Strategi Kementerian Pertanian.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penopang pertumbuhan ekonomi, serta sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Data BPS Agustus 2024 menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 12,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 28,18% dari total tenaga kerja nasional, atau setara dengan 40,76 juta pekerja. Di tengah dinamika global dan tantangan domestik, sektor pertanian tetap menunjukkan ketahanan, bahkan menjadi penyangga utama selama kurun waktu pandemi COVID-19 2019-2023, sebagaimana dicatat dalam pertumbuhan positif sektor pertanian ketika sektor lain mengalami kontraksi ekonomi. Namun demikian, sektor ini dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Pertama, ancaman perubahan iklim yang kian nyata telah menyebabkan gangguan pola tanam, kekeringan ekstrem, serta meningkatnya risiko serangan organisme pengganggu tanaman. Kedua, krisis pangan global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, gangguan pasokan akibat perang dan proteksionisme pangan menyebabkan harga beras dunia melonjak, termasuk di Jepang dan Filipina, serta diberlakukannya pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen utama seperti India dan Vietnam. Ketiga, tekanan dari sisi permintaan meningkat tajam akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang mendorong konsumsi pangan lebih tinggi. Hal ini mencerminkan urgensi untuk memperkuat sistem produksi pangan domestik, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM) pertanian sebagai aktor utama. Sementara itu, sektor pertanian di Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa krisis regenerasi petani. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 21,93% petani perorangan berasal dari kelompok usia muda (19–39 tahun), sementara sisanya didominasi oleh petani berusia di atas 40 tahun. Jumlah petani muda usia 25–34 tahun bahkan mengalami penurunan dari 11,97% pada tahun 2013 menjadi hanya 10,24% pada 2023. Demikian pula, petani usia 35–44 tahun menurun dari 26,3% menjadi 22% dalam kurun waktu yang sama. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa generasi muda semakin menjauh dari sektor pertanian dalam satu dekade terakhir.

Lebih jauh, data BPS tahun 2019 mencatat total jumlah petani mencapai 33,4 juta orang, namun hanya sekitar 8% atau 2,7 juta orang yang tergolong sebagai petani muda (usia 20–39 tahun). Sebaliknya, sebanyak 91% petani berusia di atas 40 tahun, dengan

mayoritas mendekati rentang usia 50–60 tahun. Selain itu, dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2018, tercatat adanya penurunan jumlah petani muda sebanyak 415.789 orang, menandakan bahwa proses regenerasi petani tidak hanya stagnan, tetapi cenderung mengalami kemunduran. Rendahnya partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa sektor ini kurang menjanjikan secara ekonomi, serta masih terbatasnya akses terhadap pelatihan yang relevan, infrastruktur pendukung, dan fasilitas pembiayaan yang memadai. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya formasi tenaga penyuluh pertanian, serta belum meratanya infrastruktur kelembagaan penyuluhan di berbagai wilayah. Akumulasi faktor-faktor ini menghambat upaya revitalisasi pertanian nasional dan memperbesar risiko krisis keberlanjutan di sektor ini dalam jangka panjang.

Transformasi sektor pertanian menuju era modernisasi memerlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tulang punggung utama. Di hadapan tantangan besar seperti perubahan iklim ekstrem, inovasi teknologi digital, kebutuhan regenerasi petani, hingga ketidakpastian geopolitik serta insan pertanian dituntut untuk memiliki kompetensi yang unggul. Petani, penyuluh, dan praktisi pertanian harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang adaptif agar mampu mengelola sumber daya pertanian secara efisien dan kompetitif di pasar global.

Selaras dengan visi jangka panjang pemerintah, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025–2029 telah menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi besar ini ditopang oleh lima fondasi strategis, di mana salah satu pilar utamanya adalah penguatan “Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional yang Produktif”. Fondasi inilah yang menjadi landasan operasional dalam mencetak SDM pertanian yang berkualitas tinggi. Tanggung jawab besar dalam membangun SDM dan kelembagaan pertanian secara nasional berada di bawah komando Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, literasi, hingga fasilitasi kelembagaan petani. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan setiap inovasi teknologi dapat teradopsi dengan baik hingga ke tingkat lapangan melalui tangan-tangan terampil insan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP, Balai Besar Pelatihan Pertanian

(BBPP) Binuang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan). Sebagai lembaga pelatihan yang berkedudukan di wilayah strategis Sulawesi Selatan, BBPP Binuang memegang mandat penting dalam melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis bagi aparatur maupun non-aparatur pertanian di wilayah kerja yaitu semua provinsi di Kalimantan.

Mandat strategis yang diemban BBPP Binuang berfokus pada penyiapan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada jiwa wirausaha (entrepreneurship). Melalui pengembangan model dan teknik pelatihan yang inovatif, balai berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap program pelatihan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Kalimantan. Keberadaan balai ini menjadi instrumen kunci dalam mempercepat transfer teknologi dan modernisasi sistem pertanian. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan nasional, Renstra BBPP Binuang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif. Dokumen ini menjadi kompas organisasi dalam menjalankan program pelatihan pertanian yang terukur dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan proses transformasi SDM pertanian yang kompeten dan berdaya saing global dapat terakselerasi demi tercapainya kedaulatan pangan nasional yang kokoh.

1.2. Evaluasi Kondisi Organisasi

Perencanaan strategis untuk mengevaluasi kondisi BBPP Binuang guna menyiapkan dan merumuskan langkah dengan keputusan yang tepat dilakukan dengan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan atau inisiatif internal yang berkinerja baik dan mampu menjadi daya pengungkit dalam melaksanakan program aksi antara lain:

1. Aspek Regulasi

- a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja

Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
 - d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian.
2. Aspek ketenagaan
- a) Tersedianya SDM yang memadai dengan jumlah 40 orang ASN dan 26 orang Tenaga Harian Lepas.
 - b) Tersedianya Tim Manajemen yang telah memiliki Sertifikat *Management of Training* (MOC)
 - c) Tersedianya Penyelenggara Pelatihan yang telah memiliki Sertifikat *Training Officer Course* (TOC)
 - d) Tersedianya Tenaga Pengajar/Widyaiswara yang kompeten di bidangnya
3. Aspek kelembagaan
- a) Mempunyai pelatihan unggulan yang telah terakreditasi, diantaranya:
 - 1) Pelatihan Teknis Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kategori A
 - 2) Pelatihan Teknis Budidaya Padi Lahan Rawa dengan Kategori A
 - b) Perpustakaan yang sudah terakreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI
 - c) Tersertifikasi SNI ISO 9001:2015 – *Quality Management System*;
 - d) Tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 – *Anti Bribery Management System*.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan BBPP Binuang dalam melaksanakan program aksi antara lain:

- 1. Jangkauan internet di BBPP Binuang masih lemah dan tidak kuat;
- 2. Langganan daya listrik kadang mengalami pemadaman akibat berbagai kendala eksternal;
- 3. Ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau yang sangat terbatas bahkan untuk keperluan sehari-hari, apalagi jika termasuk untuk keperluan budidaya dan kebutuhan peserta pelatihan;
- 4. Peran dan fungsi unit inkubator agribisnis sebagai unit pembelajaran kewirausahaan pertanian masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif;

5. Terbatasnya jumlah widyaiswara dan tenaga teknis di lapangan;
6. Belum maksimalnya pengembangan profesionalisme bagi widyaiswara dan tenaga pelatihan;
7. Kemampuan komunikasi dengan bahasa Inggris pegawai yang masih terbatas; dan
8. Persebaran fungsional khusus di masing-masing jabatan fungsional yang masih terbatas;

c. Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang dimiliki BBPP Binuang dalam mendukung terlaksananya program aksi antara lain:

1. Kebutuhan tenaga kerja (*job seeker*) dan pencipta lapangan kerja (*job creator*) sebagai mitra usaha yang tersertifikasi oleh perusahaan di sektor pertanian meningkat;
2. Perkembangnya teknologi/digitalisasi di bidang pertanian;
3. Tingginya minat stakeholder dalam memanfaatkan sarana prasarana Balai;
4. Tingginya minat stakeholder/pelanggan yang bekerja sama dalam bidang pelatihan pertanian;

d. Tantangan (Threats)

1. Dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan;
2. Keterbatasan infrastruktur penunjang pelatihan baik online maupun tatap muka di balai;
3. Tuntutan digitalisasi administrasi, pola kerja dan peningkatan kapasitas;
4. Menurunnya minat pemuda dalam berusaha tani; dan
5. Keterbatasan anggaran;

1.3. Capaian Kinerja 2020 – 2024

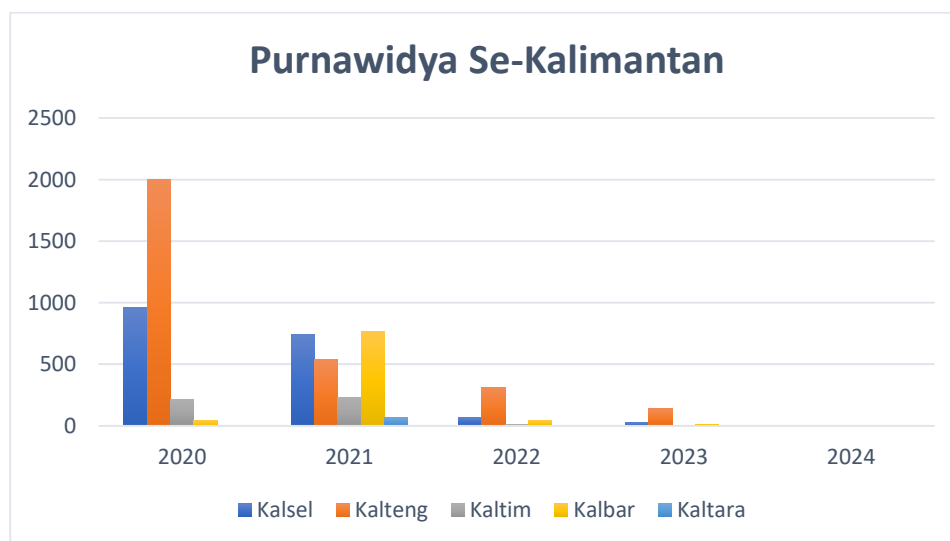
Selama periode 2020–2024, BBPP Binuang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai capaian yang diperoleh merupakan hasil dari komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan kelembagaan petani, kemitraan strategis, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Capaian kinerja tersebut menjadi modal penting dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi BBPP Binuang pada periode perencanaan berikutnya.

a. Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan merupakan tugas utama BBPP Binuang dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur maupun nonaparatur pertanian. Selama periode 2020–2024, BBPP Binuang telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup pelatihan teknis, fungsional, manajerial, kewirausahaan, serta pelatihan berbasis kebutuhan program prioritas Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran, baik secara tatap muka, blended learning, maupun pembelajaran daring, sehingga mampu menjangkau peserta dari berbagai wilayah.

Berbagai program pelatihan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas petani, penyuluh pertanian, aparatur sipil negara, pelaku usaha pertanian, serta generasi muda pertanian. Capaian tersebut menunjukkan peran strategis BBPP Binuang sebagai pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya.



Gambar 1. Data Purnawidya Se-Kalimantan 2020 - 2024

b. Penyelenggaraan Sertifikasi

Dalam rangka mendukung pengakuan kompetensi sumber daya manusia pertanian, BBPP Binuang turut memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi aparatur maupun pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan skema kompetensi yang dibutuhkan sektor pertanian.

Penyelenggaraan sertifikasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa peserta yang telah mengikuti pelatihan memiliki kompetensi yang terukur dan diakui secara profesional. Selama periode 2019–2024, jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi terus menunjukkan perkembangan yang positif seiring meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja pertanian yang kompeten dan tersertifikasi.

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Sertifikasi 2020-2024

No	Jenis Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan	Peserta
1	Sertifikasi Profesi Produksi Benih Tanaman Padi	2021	30 Orang
2	Sertifikasi THL-TBPP (Belum Lulus P3K)	2021	76 Orang
3	Sertifikasi Fungsional	2022	90 Orang
4	Sertifikasi Penanaman Tanaman Hidroponik	2023	30 Orang
5	Sertifikasi Penyuluh Pertanian Swadaya Level Fasilitator	2023	30 Orang
6	Sertifikasi Pembudidaya Sayuran Angkatan 1	2023	30 Orang
7	Sertifikasi Pembudidaya Sayuran Angkatan 2	2023	30 Orang
8	Sertifikasi Penyuluh Pertanian (PNBP)	2023	30 Orang
9	Sertifikasi Fungsional PP Ahli	2024	30 Orang
10	Sertifikasi Fungsional PP Terampil	2024	30 Orang
11	Bimtek dan Sertifikasi Fungsional PP Ahli	2024	30 Orang

c. Fasilitasi Pembinaan P4S

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis masyarakat. BBPP Binuang secara berkelanjutan melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan kapasitas P4S di wilayah binaan.

Kegiatan pembinaan meliputi peningkatan kompetensi pengelola P4S, penguatan kelembagaan, fasilitasi jejaring kemitraan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh P4S. Melalui pembinaan tersebut, P4S diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha pertanian di wilayah masing-masing serta berkontribusi dalam percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian.

Tabel 2. Capaian Pembinaan P4S 2020-2024

	Kalsel	Kalteng	Kaltim	Kalbar	Kaltara
Tahun	Nominal				
2020	120.000.000				
2021	210.000.000				
2022	55.605.085	30.000.000	89.750.000	-	26.250.000
2023	60.000.000	60.000.000	90.000.000	60.000.000	-
2024	30.000.000	60.000.000	60.000.000	30.000.000	60.000.000

d. Kerjasama-Kerjasama

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, BBPP Binuang terus memperluas jaringan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga pendidikan, organisasi profesi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Kerja sama yang dibangun mencakup berbagai bidang, antara lain penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penelitian dan pengembangan, magang, pertukaran narasumber, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pengembangan model pembelajaran pertanian. Penguatan kemitraan tersebut memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan BBPP Binuang sekaligus memperluas akses pengembangan kompetensi bagi para pemangku kepentingan sektor pertanian.



Gambar 2. Capaian Kerjasama

e. Magang, Praktik Kerja Lapangan dan Kunjungan Lapang

BBPP Binuang juga berperan sebagai wahana pembelajaran bagi siswa, mahasiswa, aparatur, dan masyarakat melalui kegiatan magang, praktik kerja lapangan (PKL), serta kunjungan lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung melalui penerapan teori dan praktik di bidang pertanian.

Selama periode 2019–2024, BBPP Binuang menerima peserta magang dan PKL dari berbagai perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan, serta lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, kunjungan lapangan dari berbagai instansi dan kelompok masyarakat juga terus meningkat sebagai bentuk kepercayaan terhadap BBPP Binuang sebagai pusat pembelajaran dan demonstrasi teknologi pertanian.

f. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran selama periode 2019–2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BBPP Binuang terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi dan program prioritas pembangunan pertanian.

Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, kualitas pengelolaan anggaran yang baik juga tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima BBPP Binuang di bidang pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara.

Tabel 3. Capaian Realisasi Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
1	2020	13.521.786.000	13.048.092.464	96,50%
2	2021	15.999.785.000	15.195.129.674	94,97%
3	2022	8.905.685.000	8.736.345.280	98,10%
4	2023	8.514.307.000	8.329.208.688	97,83%
5	2024	10.391.071.000	10.233.049.715	98,48%

g. Realisasi PNBPN

Sebagai satuan kerja yang mengelola berbagai layanan pelatihan dan pemanfaatan aset negara, BBPP Binuang turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber PNBP berasal dari

pemanfaatan sarana dan prasarana, kerja sama pemanfaatan aset, serta layanan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama periode 2019–2024, realisasi PNBP menunjukkan tren yang positif sebagai hasil dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh BBPP Binuang. Peningkatan realisasi PNBP mencerminkan semakin baiknya kualitas layanan serta efektivitas pengelolaan aset dan sumber daya organisasi dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan publik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

a. Visi Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah: "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" Secara umum, Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

b. Misi Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan kondisi dimana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat

diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu: 1) Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian; 2) Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani; dan 3) Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah Monkeypox (Mpox), Rabies, Antraks, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

c. Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029. Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan, yaitu pertumbuhan volume usaha pertanian dan pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas.
2. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas yang diukur dengan 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu: indeks swasembada pangan prioritas, indeks penerapan sistem budi daya pertanian, dan indeks cadangan asal pertanian nasional.
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat yang diukur dengan indikator tujuan persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energy, pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian, dan persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian.
4. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia yang diukur dengan indikator tujuan persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular kepada manusia.
5. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan BPPSDMP Tahun 2025-2029

a. Visi BPPSDMP

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)

2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah:

“Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.”

Berdasarkan visi Badan PPSDMP 2025 – 2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan positioning SDM pertanian sebagai human capital untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. SDM sebagai human capital merupakan perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian yang tidak memandang manusia sebagai faktor produksi

namun sebagai modal penting dalam pembangunan pertanian ke depan. Penjelasan dari masing-masing kata kunci dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

1. SDM Pertanian Produktif

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

2. SDM Pertanian Maju

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

3. SDM Pertanian Mandiri

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha

4. SDM Pertanian Sejahtera

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan SDM yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan penyelarasan dengan sistem nilai Badan PPSDMP, yaitu:

1. **Inklusif**, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas,
2. **Profesional**, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas,
3. **Modern**, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

b. Misi BPPSDMP

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan

Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma *human capital* dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani. Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan *output* yang lebih besar dengan *input* minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di

sektor pertanian untuk secaremandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

c. Tujuan BPPSDMP

Tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Perumusan tujuan ini menerjemahkan misi ke dalam capaian yang terukur, sehingga tingkat ketercapaian tujuan mencerminkan pelaksanaan misi BPPSDMP secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi organisasi pada periode 2025–2029. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, dirumuskan tiga tujuan BPPSDMP sebagai berikut:

Tujuan 1

Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa, yang diukur melalui indikator *Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa*. Target indikator ini ditetapkan sebesar **22,03 persen pada tahun 2025** dan meningkat secara bertahap hingga **22,43 persen pada tahun 2029**.

Tujuan 2

Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani, yang diukur melalui indikator *Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas*. Target pertumbuhan pelaku usaha

tani yang naik kelas ditetapkan sebesar **1 persen per tahun** selama periode **2025–2029**.

Tujuan 3

Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional, yang diukur melalui indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:

1. *Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor*, dengan target **88,5 persen pada tahun 2025** meningkat menjadi **89,5 persen pada tahun 2029**;
2. *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* BPPSDMP, dengan target **90,00 pada tahun 2025** meningkat menjadi **91,00 pada tahun 2029**;
3. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* terhadap layanan BPPSDMP, dengan target **3,60 pada tahun 2025** meningkat menjadi **3,64 pada tahun 2029**.

2.3. Sasaran Program BPPSDMP

Berdasarkan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029**, Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dilakukan melalui penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Kontribusi BPPSDMP terhadap pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan ke dalam Sasaran Program **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.”** Sasaran ini merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya pendukung lainnya, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dimaknai sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja, dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup BPPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan

peningkatan kelas usaha tani sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirausahaan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

2.4. Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian

Berdasarkan IKSP Pusat Pelatihan Pertanian yang ingin dicapai pada periode Tahun 2025-2029, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode Tahun 2025-2029, adalah :

- a. SK 1. Meningkatnya kompetensi petani;
 - ✓ IKSK 1.1 SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%).
- b. SK 2. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan);
 - ✓ IKSK 2.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur) (%);
 - ✓ IKSK 2.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur) (%).
- c. SK 3. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan teknis pertanian (sesudah pelatihan);
 - ✓ IKSK 3.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%); IKSK 3.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) (%).
- d. SK 4. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan;
 - ✓ IKSK 4.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (Skala Likert 1 - 5).

2.5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BBPP Binuang

Berdasarkan IKSP Pusat Pelatihan Pertanian yang ingin dicapai pada periode Tahun 2025-2029, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode Tahun 2025-2029 disusun dalam tabel berikut :

Tabel 4. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan BBPP Binuang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)
		Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)
2.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Binuang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binuang

2.6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Dalam konteks Renstra, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, adaptif, serta berkelanjutan di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Penerapan manajemen risiko dalam organisasi memiliki tujuan antara lain:

- Mengantisipasi potensi kegagalan pencapaian sasaran strategis.
- Meminimalkan dampak negatif yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko.
- Memastikan keberlanjutan program pembangunan SDM pertanian.

Berdasarkan analisis, risiko BBPP Binuang tahun 2025 2029 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

a) Risiko pelaksanaan layanan

- ✓ Perubahan isi lingkungan strategis yang dinamis seperti anomali iklim dan ancaman kekeringan atau banjir;

- ✓ Belum optimalnya jejaring kerjasama pelatihan dan pendayagunaan sarana prasarana balai;
- ✓ Banyaknya lembaga eksternal di luar UPT Pusat Pelatihan Pertanian yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi serupa;
- ✓ Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian.

b) Risiko operasional

- ✓ Kesenjangan kompetensi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan dalam penguasaan teknologi seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan instalasi pertanian cerdas;
- ✓ Keterbatasan kemampuan tenaga pelatihan dan Widyaiswara dalam penguasaan IT, AI dan bahasa asing;
- ✓ Lemahnya sistem *tracer training* purnawidya pasca pelatihan;

c) Risiko teknis lapangan

- ✓ Kesulitan jaringan internet di daerah saat pelaksanaan pelatihan secara online;
- ✓ CPCL yang disampaikan oleh dinas tidak sesuai dengan tujuan pelatihan;
- ✓ Kurikulum pelatihan yang disusun, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- ✓ Pemeliharaan sarana pelatihan belum dilakukan secara berkala.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah dan Kebijakan Kementerian Pertanian

Pada periode 2025–2029, arah kebijakan Kementerian Pertanian diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditetapkan sebagai prioritas strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Pencapaian swasembada pangan diarahkan melalui implementasi Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 yang berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama melalui intervensi hulu–hilir, antara lain cetak sawah dan perluasan areal tanam, optimasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman, penyediaan benih unggul, perbaikan irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, serta peningkatan produksi susu dan daging nasional. Proyek strategis nasional di bidang pertanian menjadi bagian integral dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan pokok.

Sejalan dengan agenda hilirisasi nasional, kebijakan pertanian juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui penguatan agroindustri berbasis wilayah. Komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan ubi kayu didorong masuk ke rantai pasok industri melalui penguatan pascapanen, fasilitasi investasi, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, strategi peningkatan produksi protein hewani ditempuh melalui pengembangan subsektor peternakan, termasuk pembibitan, peningkatan populasi ternak, dan investasi peternakan berkelanjutan. Upaya tersebut dilengkapi dengan ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi dalam rangka penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, Kementerian Pertanian mendukung transisi energi nasional melalui percepatan program mandiri energi berbasis biodiesel dengan peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menstabilkan harga komoditas sawit, serta

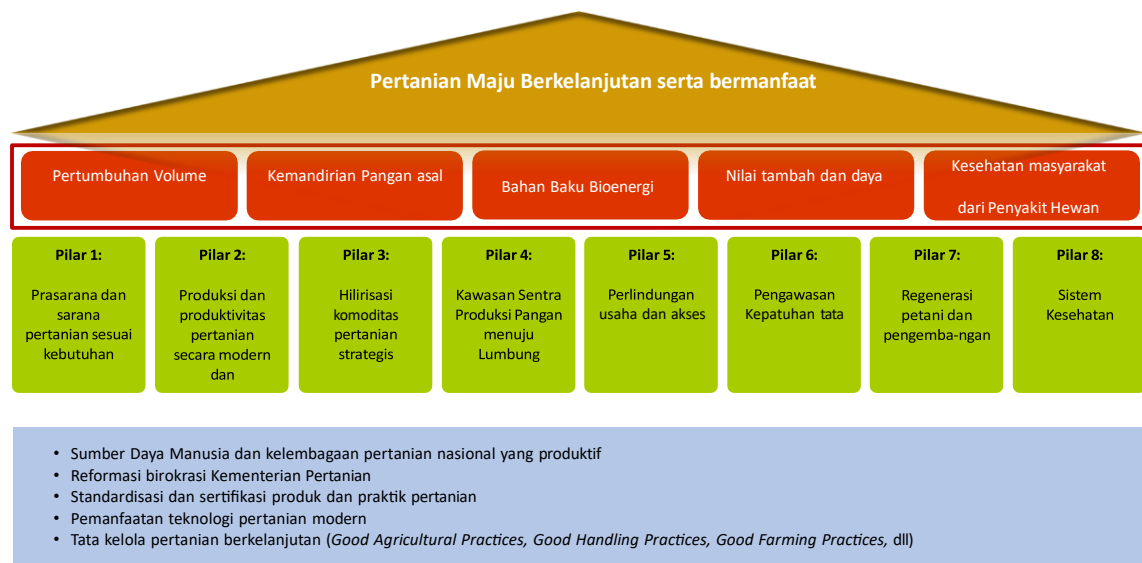
memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, strategi terintegrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian. Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. Rumah Strategi Kementerian Pertanian

Kerangka arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dituangkan dalam **Rumah Strategi Kementerian Pertanian** sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Rumah strategi tersebut menggambarkan keterkaitan yang utuh antara visi, tujuan antara, pilar pembangunan, dan fondasi pendukung yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Kementerian Pertanian menetapkan **lima tujuan antara** yang ingin dicapai, yaitu:

1. pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. kemandirian pangan asal pertanian;
3. pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
5. terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Pencapaian kelima tujuan antara tersebut mensyaratkan ditegakkannya **delapan pilar utama pembangunan pertanian** secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
4. pemanfaatan dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional untuk memperkuat rantai nilai;
5. perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;

6. pengawasan kepatuhan terhadap penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan;
7. regenerasi petani serta pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing; dan
8. penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Agar pilar-pilar pembangunan pertanian tersebut dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan **fondasi yang kokoh dan saling mendukung**. Oleh karena itu, pembangunan pertanian nasional periode 2025–2029 ditopang oleh **lima fondasi utama**, yaitu:

1. sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif dan berdaya saing;
2. reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik yang efektif;
3. standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian sebagai penjamin mutu dan daya saing;
4. pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh tahapan usaha tani, mulai dari budidaya hingga pascapanen; dan
5. penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices*, serta praktik baik lainnya

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan BPPSDMP difokuskan pada dua pokok utama. Pertama, peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia, yang dioperasionalkan melalui strategi: (1) regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan (2) pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai penguatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua,

penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia pertanian pada periode 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja, tetapi terutama pada peningkatan kualitas melalui penguatan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan di tingkat lapangan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Pada periode 2025–2029, BPPSDMP berperan strategis sebagai penggerak utama regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia secara berkelanjutan.

3.3. Strategi Operasional BBPP Binuang

Operasional BBPP Binuang selaku UPT BPPSDMP sejalan dan linear dengan arah kebijakan BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian dalam menjalankan dan mentransformasikan kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional
 - a. Pengembangan pelatihan pertanian teknis dan vokasional, serta standardisasi dan sertifikasi profesi, dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - ✓ Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis SKKNI/SKK (Standar Kompetensi Kerja);
 - ✓ Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - ✓ Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - ✓ Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital;
 - ✓ Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline;

- ✓ Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - ✓ Perbaikan fasilitas dan sarana prasarana praktik;
 - ✓ Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - ✓ Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - ✓ Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri untuk menjamin relevansi lulusan pelatihan;
 - ✓ Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani;
 - ✓ Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional;
 - ✓ Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - ✓ Menyusun dan memutakhirkan bahan ajar, modul, serta media pembelajaran berbasis kompetensi;
 - ✓ Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- b. Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian, dengan langkah operasional sebagai berikut:
- ✓ Penumbuhan wirausahawan muda pertanian melalui pelatihan dan magang;
 - ✓ Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni magang, dan pemuda tani di kawasan pertanian;
 - ✓ Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - ✓ Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial;
 - ✓ Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian;
 - ✓ Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan DPM/DPA;
 - ✓ Peningkatan kapasitas P4S dalam upaya pengembangan petani milenial.
- c. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi sejalan dengan strategi BPPSDMP untuk regenerasi petani
- ✓ Mengembangkan program magang dan inkubasi bagi petani milenial untuk mengubah pola pikir dari sekadar budidaya menjadi wirausaha (agribisnis);
 - ✓ Melakukan pembinaan intensif terhadap Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah Kalimantan sebagai mitra strategis dalam penyebaran inovasi secara *peer-to-peer*.

- ✓ Melakukan pendampingan untuk Brigade Pangan agar mandiri dan berdaya saing menjadi kelompok unggulan
- 2. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - ✓ Penerapan manajemen talenta ASN;
 - ✓ Peningkatan sistem merit ASN;
 - ✓ Penataan jabatan fungsional;
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - ✓ Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - ✓ Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - ✓ Perluasan implementasi sistem integritas;
 - ✓ Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;

3.4. Kerangka Kelembagaan

BBPP Binuang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah BPPSDMP. Sebagai bagian dari sistem kelembagaan BPPSDMP, BBPP Binuang berperan dalam melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Hubungan kerja antara BBPP Binuang dan BPPSDMP dilakukan melalui pola koordinasi yang terstruktur, meliputi rapat rutin, monitoring dan evaluasi capaian program. BBPP Binuang melaporkan kinerja, realisasi anggaran, dan pencapaian program secara berkala melalui sistem digital BPPSDMP, sehingga tercipta akuntabilitas yang jelas. Selain hubungan internal, BBPP Binuang juga menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, antara lain Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, kelompok tani, perguruan tinggi, lembaga riset, industri pertanian, serta masyarakat luas. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi program pelatihan, magang, dan pengembangan inovasi, serta penyediaan informasi dan layanan publik yang transparan. Melalui hubungan kerja internal yang harmonis dengan BPPSDMP dan kolaborasi eksternal yang efektif, BBPP Binuang mampu melaksanakan program pembangunan pertanian secara efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi peningkatan kapasitas SDM pertanian

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kinerja BPPSDMP Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran program, yaitu **"Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani"**. Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja program, yakni "Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas", dengan satuan persen (%). Target pertumbuhan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 1% setiap tahun, mulai tahun 2025 hingga 2029. Target sebesar 1% per tahun tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi awal (baseline) serta kapasitas intervensi program yang tersedia. Pencapaiannya akan didukung melalui berbagai kegiatan strategis BPPSDMP yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan skala usaha pelaku usaha tani.

Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/202 dan B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu:

- i. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- ii. Program Dukungan Manajemen.

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan program tersebut melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan pertanian yang dirumuskan kedalam 4 (empat) pilar, yaitu :

- i. Peningkatan kompetensi petani;
- ii. Peningkatan kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah Pelatihan);
- iii. Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan); dan
- iv. Peningkatan kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan

Sejalan dengan program Pusat Pelatihan Pertanian, BBPP Binuang juga melaksanakan kegiatan "Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian", yang kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis kegiatan, sebagaimana tabel xx

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, BBPP Binuang telah menetapkan target kinerja untuk 5 tahun ke depan yang terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Target Kinerja 2025 - 2029

Program/kegiatan	Sasaran/program/ indikator kinerja sasaran program/sasaran kegiatan/ indikator kinerja sasaran kegiatan			Satuan	Target					
					2025	2016	2027	2028	2029	
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	SK 1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)								
		IKSK 1.1.	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)		% (persen)	20	18	16	14	12
		IKSK 1.2.	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)		% (persen)	25	23	21	19	17
	SK 2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan								
		IKSK 2.1.	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan		Skala likert (1-5)	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
	SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang								
		IKSK 3.1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang		Nilai	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	SK 4	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan								
		IKSK 4.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binuang		Skala likert (1-4)	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45

Guna mencapai target tersebut BBPP Binuang menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2025-2029 sesuai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut, diantaranya :

- a. Menyelenggarakan pelatihan teknis, vokasi dan fungsional untuk aparatur;
- b. Menyelenggarakan pelatihan teknis, vokasi untuk nonaparatur pertanian;
- c. Menyelenggarakan sertifikasi profesi di bidang pertanian;
- d. Melakukan pengembangan program dan kegiatan pelatihan;
- e. Melaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;
- g. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran;
- h. Melakukan *updating* Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan;
- i. Melakukan *updating* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- j. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. Mengukur kinerja Balai setiap triwulan melalui penyusunan Laporan Kinerja triwulanan;
- l. Menyusun Laporan Tahunan Balai, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawanan pelaksanaan kegiatan selama setahun;
- m. Melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan, melalui aplikasi e-Monev Bappenas.
- n. Meningkatkan pelayanan internal;
- o. Melaksanakan pembinaan pegawai;
- p. Mengelola informasi, publikasi dan promosi;
- q. Menyelenggarakan layanan konsultasi agribisnis dan inkubator agribisnis.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan instrumen krusial yang menyelaraskan ketersediaan sumber daya finansial dengan target capaian kinerja organisasi. Dalam periode lima tahun ke depan, BBPP Binuang berkomitmen pada pengelolaan anggaran yang berbasis pada prinsip Value for Money (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan mampu menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi SDM pertanian.

1. Proyeksi kebutuhan anggaran

Anggaran yang diterima dan dikelola diarahkan pada kebutuhan prioritas. Pendanaan yang didapatkan untuk memperbaiki pilar utama penyelenggaraan pelatihan yang modern dan kompetitif diantaranya:

- a. Modernisasi sarana dan prasarana pelatihan
- b. Peningkatan kapasitas SDM internal
- c. Pemeliharaan aset-aset strategis
- d. Penguatan kerjasama regional wilayah kerja

2. Diversifikasi sumber pendanaan

Pendanaan BBPP Binuang didapatkan dari anggaran melalui APBN dan PNBPN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang berasal dari sumber dana berbeda

a. Rupiah Murni

Alokasi dana yang murni berasal dari pendapatan pajak dan bukan dari pinjaman, hibah luar negeri, atau pendapatan layanan tertentu. Dana ini digunakan untuk membiayai belanja pegawai, pelayanan dasar, operasional kementerian/lembaga, serta program nasional

b. PNBPN (Pendapatan negara bukan pajak)

BBPP Binuang mengoptimalkan aset yang ada untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak agar menghasilkan penerimaan negara nonpajak yang dapat menggunakan sebagian dana tersebut langsung untuk membiayai operasional dan peningkatan layanan

3. Strategi pengelolaan

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, BBPP Binuang menerapkan sistem monitoring yang ketat terhadap realisasi anggaran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Periode 2025–2029 bukan sekadar tumpukan dokumen administratif, melainkan sebuah manifestasi komitmen kolektif institusi. Dokumen ini menjadi peta jalan strategis sekaligus instrumen kendali akuntabilitas dalam upaya nyata meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya di wilayah regional Kalimantan.

Tantangan sektor pertanian ke depan, mulai dari regenerasi petani muda, tuntutan swasembada pangan, adopsi teknologi pertanian modern, hingga mitigasi perubahan iklim, menuntut BBPP Binuang untuk terus bergerak adaptif, inovatif, dan responsif. Keberhasilan dalam mewujudkan seluruh target kinerja yang tertuang dalam dokumen ini sangat ditentukan oleh konsistensi dalam implementasi, penguatan sinergi lintas sektor, serta pengawasan mutu pelatihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra ini harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan BBPP Binuang.

Segala capaian strategis lima tahun ke depan tidak akan terwujud tanpa adanya integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi dari seluruh jajaran manajemen, widyaiswara, serta staf BBPP Binuang. Evaluasi secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, sekaligus melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap dinamika kebijakan pembangunan pertanian nasional.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis BBPP Binuang Periode 2025–2029 ini dapat memberikan kontribusi terbaik serta dampak nyata bagi kemajuan pembangunan pertanian Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045.